



**SIKAP POLITIK PETANI DALAM PILKADA KABUPATEN
SEMARANG 2015 DI KELURAHAN PRINGAPUS
KECAMATAN PRINGAPUS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

Oleh:

Malisa Ladini

NIM. 3312412019



JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

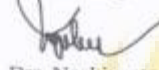
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : *Senin*
Tanggal : *28 Maret 2016*

Pembimbing I



Drs. Ngabiyanto, M.Si.
NIP. 196501031990021001

Pembimbing II



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 196101271986011001

Mengetahui:
Ketua Jurusan PKn



Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

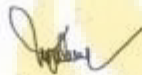
Hari : Kamis
Tanggal : 28 April 2016

Penguji I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.
NIP. 197303312005012001

Penguji II



Drs. Ngabiyanto, M.Si.
NIP. 196501031990021001

Penguji III



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 196101271986011001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Drs. Moh. Soehatun Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 29 Maret 2015



Malisa Ladini
3312412019



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ *Perjuangan hanya dapat mencapai hasil apabila berpedoman kepada suatu cita-cita besar yang umurnya lebih lama dan lebih lanjut daripada hidup manusia (Bung Hatta)*
- ❖ *Berbahagia dalam proses, tidak lari dari (destiny), meneguhkan harapan, dan mencapai (finish strong)*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ *Untuk Allah Maha Kuasa yang sudah memberkahi perjalananku.*
- ❖ *Untuk Ayah Kirmanto Antok dan Ibu Eriana Widiati yang selalu memanjatkan doa bagiku sehingga motivasiku tak pernah padam.*
- ❖ *Untuk Oni Andhi Asmara, Fidelia Febi Valentika, Alvis Rian Fhaedra, Nova Satya Dewantara yang selalu menyayangiku dan mendukungku.*
- ❖ *Untuk kawan-kawanku yang sudah ikut memberikan warna dalam usahaku.*
- ❖ *Untuk dosen-dosen dan alamamater Universitas Negeri Semarang.*
- ❖ *Untuk segenap keluarga besar Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Ladini, Malisa. 2016. *Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Pembimbing I Drs. Ngabiyanto, M.Si, Pembimbing II Drs. Slamet Sumarto, M.Pd. 102 halaman.

Kata Kunci : Sikap Politik, Petani, Pilkada.

Eksistensi petani memiliki pengaruh dalam perpolitikan di Indonesia karena petani merupakan kesatuan yang dapat digerakkan. Sikap politik petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus mencerminkan perkembangan kesadaran politik masyarakat bawah dalam menghadapi ajang demokrasi. Tujuan penelitian ini yakni: (1) mengetahui sikap politik petani di Kelurahan Pringapus dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 terhadap Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon, dan (2) mengetahui sikap politik petani di Kelurahan Pringapus dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yakni: (1) metode kualitatif karena permasalahan bersifat dinamis, (2) latar penelitian di Kelurahan Pringapus, (3) fokus penelitian yaitu sikap politik petani terhadap Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon dan sikap politik terhadap pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, (4) sumber data primer yaitu petani, Tim Pemenangan Mundjirin-Ngesti dari PDIP, Tim Sukses Nur Jatmiko-Mas'ud Ridwan dari Golkar, sumber data sekunder tertulis dan foto, (5) teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara, (6) teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, (7) teknik analisis data menggunakan model analisis interaksi (reduksi data, sajian data, dan simpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Kelurahan Pringapus yang aktif dalam Kelompok Tani memiliki sikap politik terhadap Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 yang lebih baik, pengetahuannya memahami Partai Politik, emosinya suka terhadap Partai Politik yang memberi bantuan, dan konatifnya memilih Partai Politik yang mempedulikan nasib petani, sebaliknya petani yang tidak aktif dalam Kelompok Tani memiliki sikap politik yang lebih buruk, pengetahuannya belum memahami Partai Politik, emosinya tidak suka terhadap kinerja Partai Politik, dan konatifnya mengalami kebingungan. Petani di Kelurahan Pringapus yang aktif dalam Kelompok Tani memiliki sikap politik terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati yang lebih baik, pengetahuannya memahami pasangan calon, emosinya suka dengan kampanye pasangan calon, dan konatifnya cenderung memilih pasangan calon yang memberikan pendekatan, sebaliknya petani yang tidak aktif dalam Kelompok Tani sikap politiknya lebih buruk, pengetahuannya belum memahami calon, emosinya tidak suka terhadap pasangan calon, dan konatifnya mengalami kebingungan.

Saran, perlu adanya pendekatan yang lebih intens dari Partai Politik dan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati terhadap kaum petani yang tidak aktif dalam kelompok Tani, seperti komunikasi politik yang lebih mendalam kepada petani.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmatNya sehingga skripsi yang berjudul “Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus” dapat selesai dengan baik. Berbagai pihak telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara fisik maupun psikis. Penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas sarana yang sudah disediakan.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Drs. Ngabiyanto, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing dan membantu penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Dosen Pembimbing II yang telah sabar mengarahkan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Mustofa S.H., Lurah Pringapus yang telah sepenuh hati mengizinkan penulis mengadakan penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 29 Maret 2016

Malisa Ladini
3312412019

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sikap Politik	
1. Sikap	14
2. Politik	23
3. Sikap Politik	26
B. Petani	
1. Definisi Petani	30
2. Jenis-jenis Petani	32
C. Kampanye Politik	33
D. Kerangka Berpikir	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	38
B. Latar Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian	42
E. Teknik Pengambilan Sample	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Keabsahan Data	47
H. Teknik Analisis Data	49
I. Langkah-Langkah Penelitian	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian 57
2. Sikap Politik Petani di Kelurahan Pringapus terhadap Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Calon dalam Pilkada Kabupaten Semarang 201568
3. Sikap politik petani di Kelurahan Pringapus terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 76

B. Pembahasan

1. Sikap Politik Petani di Kelurahan Pringapus terhadap Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung Calon dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 82
2. Sikap politik petani di Kelurahan Pringapus terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 90

BAB V PENUTUP

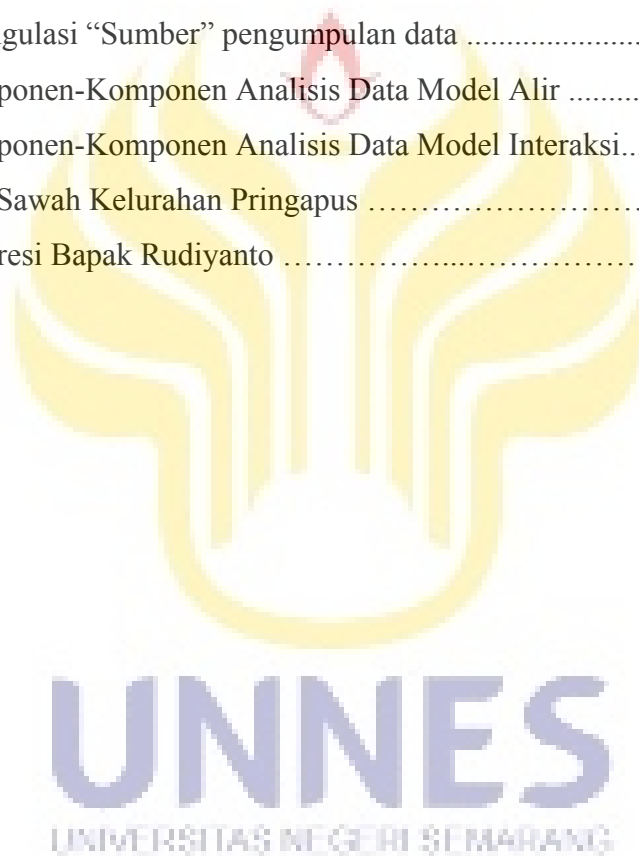
- A. Kesimpulan 96
- B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Stratifikasi Sosial di Indonesia	5
2. Kerangka Berfikir terbentuknya Judul Penelitian	36
3. Triangulasi “teknik” pengumpulan data	48
4. Triangulasi “Sumber” pengumpulan data	49
5. Komponen-Komponen Analisis Data Model Alir	50
6. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaksi.....	51
7. Peta Sawah Kelurahan Pringapus	58
8. Ekspresi Bapak Rudiyanto	80



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Jumlah Penduduk Kecamatan Pringapus	62
2. Daftar Lapangan Usaha Kelurahan Pringapus	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Surat Izin Survy Awal
2. Surat Izin Penelitian
3. Instrumen Penelitian
4. Hasil Wawancara dengan Petani di Kelurahan Pringapus
5. Hasil Wawancara dengan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 (Mundjirin-Ngesti) dan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 (Nur Jatmiko-Mas'ud Ridwan)
6. Catatan Anekdote Penelitian dengan Petani di Kelurahan Pringapus
7. Catatan Anekdote Penelitian dengan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 (Mundjirin-Ngesti)
8. Catatan Anekdote Penelitian dengan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 (Nur Jatmiko-Mas'ud Ridwan)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu tolok ukur negara demokrasi. Pemilu merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita rakyat dalam menyongsong kehidupan bernegara yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 mendatang merupakan langkah awal terbentuknya mekanisme baru dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 tersebut merupakan upaya terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung telah berlangsung sejak tahun 2005. Peristiwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pendukung demokratisasi. Sebelumnya pada masa Orde Baru terjadi pemerintahan yang sifatnya sentralistik, sehingga kekuasaan tidak terdistribusi sampai ke daerah. Otonomi daerah pasca reformasi memicu terjadinya desentralisasi yang menjadi salah satu representasi dari negara Indonesia yang lebih demokrasi. Salah satu tolok ukur negara demokrasi ialah adanya penyelenggaraan pemilu. Pemilu di Indonesia dilakukan secara berkala untuk memilih pemimpin. Demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat. Pemilu menjadi salah satu pijakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, terlebih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Semarang merupakan ajang pemilihan umum yang dilaksanakan langsung oleh rakyat.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan cara melatih masyarakat memiliki kesadaran berdemokrasi. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi Pancasila. Pilkada menunjukkan adanya pola kehidupan sistem kedaulatan rakyat yang demokratis. Rakyat Indonesia dapat turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Pedoman penyelenggaraan pemilu dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Dalam peraturan tersebut merupakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum penyelenggaraan

Pemilihan Umum harus memiliki beberapa asas seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan aksesibilitas.

Pemilu membuat kehidupan politik di Indonesia lebih terakomodasi. Warga negara merupakan substansial yang penting dalam pelaksanaan pemilu, karena pada dasarnya kekuatan pemilihan masyarakat menentukan nasib negara ke depannya. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilu, baik warga negara dengan latar belakang suku, agama, ras, status sosial, status pendidikan, dan golongan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 BAB X Warga Negara Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik”. Petani merupakan elemen masyarakat yang cukup banyak dan memiliki khas tersendiri, sehingga sikap politik kaum petani dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Semarang 2015 menjadi menarik untuk diteliti.

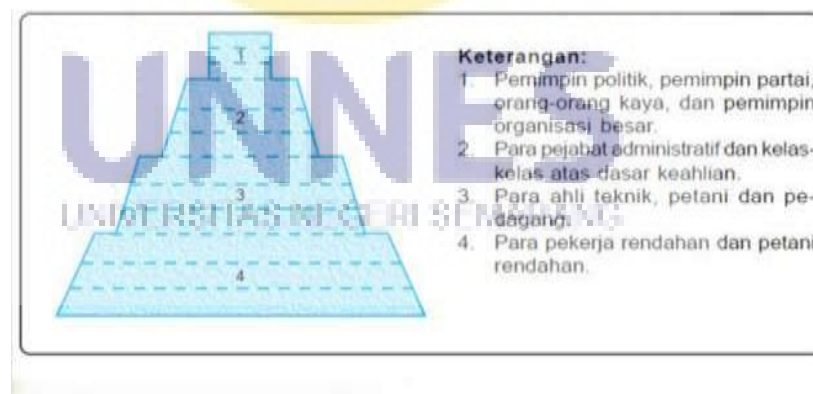
Indonesia adalah negara multikultural, Indonesia memiliki ribuan pulau, ribuan suku, ras dan agama. Negara Indonesia juga merupakan negara agraris dengan wilayahnya yang begitu cocok digunakan untuk bercocok-tanam. Wilayah Indonesia yang terpisah-pisah memiliki

pengaruh yang sangat besar dalam membentuk rasa nasionalisme karena dipisahkan oleh kondisi geografis dan berbagai macam cara untuk mencari mata pencaharian. Petani merupakan salah satu mata pencaharian yang dimiliki oleh sebagian penduduk Indonesia. Petani juga merupakan salah satu elemen yang memberikan dampak dalam roda perekonomian di Indonesia. Indonesia dapat disebut sebagai negara bermartabat jika Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai negara produsen yang menghasilkan produk hasil cocok tanam yang berkualitas, sehingga petani merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menyokong perekonomian di Indonesia.

Data BPS menunjukkan bahwa petani di Indonesia berjumlah 31,70 juta jiwa sampai tahun 2013. Petani merupakan seseorang yang fokus melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya. Seseorang yang memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan juga dapat disebut sebagai petani. Menurut catatan sejarah nusantara, pedesaan telah menjadi arena pertarungan kekuasaan politik maupun perebutan sumber daya ekonomi. Petani merupakan cirikhas sebuah pedesaan. Dinamika dan gejolak sosial dapat diperhatikan dari kehidupan pedesaan yang selama ini tidak jauh dari peran kaum tani sebagai pelaku utama gerakan perlawanan. Gejolak sosial di pedesaan juga menjadi bukti akan kembali marak setelah NKRI diproklamkan. Peran petani di pedesaan lebih massif dan berpengaruh besar terhadap corak perubahan yang berlangsung secara nasional setelah era kemerdekaan, khususnya pada periode 1950-an hingga

akhir 1960-an. Seorang akademisi dan tokoh sejarawan nasional, Sartono Kartodirdjo, telah merintis studi terhadap peran kaum petani dalam perubahan sosial dan konstalasi politik nasional. Ia mengungkapkan melalui bukunya tentang keprihatinannya terhadap rendahnya minat sejarawan maupun peneliti sosial yang tertarik untuk mengangkat kembali peran gerakan petani pedesaan dalam dinamika perubahan sosial.

Sepak terjang petani dalam perpolitikan di Indonesia dapat dilihat dari gerakan petani yang banyak berpengaruh dalam kehidupan politik bangsa. Hal ini bisa dibuktikan ketika Partai Komunis Indonesia sebelum melakukan gerakan revolusi G 30/S PKI merangkul kaum petani. Jumlah petani yang sangat banyak seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan yang ingin menggerakkan kaum petani karena dalam stratifikasi sosial Indonesia, petani terletak pada bagian bawah. Stratifikasi sosial di Indonesia disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Stratifikasi Sosial di Indonesia

Sumber: Stratifikasi di Indonesia. <http://www.sselajar.com/>. Diunduh Minggu, 28 Desember 2014 | 11:46WIB

Faktanya kehidupan petani secara finansial atau kehidupan ekonominya terbatas dan butuh diperjuangkan, sehingga para petani sangat memerlukan belas kasihan. Keadaan yang terbatas tersebut menjadi pemicu bahwa petani dapat dengan mudah digerakkan apabila ada pihak-pihak yang mempedulikan nasib mereka. Rentannya golongan petani dalam dunia perpolitikan disebabkan oleh pendidikan mereka yang rendah, sehingga sikap politik mereka juga cenderung tanpa pendirian dan terkesan asalkan ada yang peduli maka mereka akan memperjuangkannya. Petani memiliki citra yang kian tersingkir dalam kehidupan sehari-hari karena stigma “miskin” dan “bodoh”. Banyak anak muda yang enggan menjadi petani, meskipun orangtuanya ialah petani. Pemuda zaman modern ini lebih menyukai untuk bekerja di sebuah lapangan pekerjaan yang dapat menampungnya. Pertimbangannya ialah jika mereka bekerja di sebuah lapangan pekerjaan, tentu akan mendapatkan gaji tetap setiap bulan. Daya juang pemuda baik keturunan petani atau tidak pun saat ini semakin berkurang. Kurangnya daya juang untuk menjadi petani disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya faktor untuk bertahan dengan keadaan ekonomi yang sangat minim, terlebih adanya ancaman jika gagal panen. Penghasilan petani yang tidak menentu setiap bulannya karena bergantung dengan keadaan alam.

Berdasarkan Teori Marxisme yang menyatakan tentang perjuangan kelas buruh. Teori ini juga nampak diterapkan di Indonesia yakni menggunakan kelas petani. Kelas petani secara mayoritas digunakan

untuk melakukan sebuah perubahan. Kaum tani memiliki dominasi jumlah dalam kelas sosial di Indonesia, meskipun secara status sosial marjinal akan tetapi memiliki jumlah yang maksimal. Petani yang keadaannya marjinal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh partai-partai politik dalam menentukan kemenangan partainya. Globalisasi menjadi pengaruh tergeraknya sebuah perubahan sosial. Globalisasi diartikan oleh *World Economic Outlook* pada bulan Mei 1997 meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang ditandai oleh meningkatnya dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat. Petani tidak siap dalam menghadapi globalisasi sehingga seringkali sikap politik petani pasang surut akibat media. Pasang surutnya sikap petani ini membuat petani yang terlihat homogen justru memiliki kehidupan politik yang sangat dinamis.

Masyarakat petani Kelurahan Pringapus merupakan salah satu elemen kecil dari seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Pilkada Kabupaten Semarang untuk memilih calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Berdasarkan Data Kependudukan di Kecamatan Pringapus terbaru yaitu tahun 2013, penduduk di wilayah Pringapus sebanyak 8.747 jiwa, dengan luas wilayah 5 km². Dari luas wilayah tersebut sebanyak 72,65 Ha merupakan lahan pertanian yang terbagi ke dalam lahan pertanian sawah irigasi sebanyak 68,66 Ha dan lahan pertanian sawah tadah hujan sebanyak 3,99 Ha.

penduduk di wilayah Kelurahan Pringapus bekerja di empat sektor yang dominan yaitu di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Petani yang ada di Kelurahan Pringapus jika dipresentase dari data Kecamatan Pringapus berjumlah sebanyak 7,48 persen.

Data Kependudukan Kelurahan Pringapus menunjukkan adanya dominasi penduduk yang bekerja di sektor industri/buruh pabrik. Sebagian besar generasi muda yang tinggal di Pringapus lebih memilih menjadi buruh pabrik setelah lulus SMP/SMA dibandingkan menjadi seorang petani. Kecamatan Pringapus yang pada umumnya di daerah Kabupaten Semarang merupakan kawasan industri. Pemuda-pemudi di wilayah Pringapus merasa malu untuk meneruskan profesi orangtuanya sebagai seorang petani dan memilih bekerja menjadi buruh pabrik agar memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Fakta kawasan industri menunjukkan bahwa keberadaan petani di Pringapus berangsur-angsur semakin berkurang. Jumlah petani yang semakin berkurang ini menunjukkan kurangnya kesejahteraan hidup petani. Kesejahteraan hidup petani yang dinilai kurang perlu diteliti dengan relevansinya terhadap kesadaran politiknya, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Sikap politik kaum petani dinilai sebagai representasi kesadaran politik suatu masyarakat. Komponen sikap politik petani yaitu penilaian kognitif, afektif, dan konatif petani terhadap partai politik/gabungan partai politik dan calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015. Komponen kognitif yaitu aspek intelektual yang sering berkaitan dengan

apa yang diketahui manusia. Komponen ini berupa pengetahuan, persepsi, kepercayaan, dan sejauh mana masyarakat tahu mengenai partai politik, calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Semarang 2015. Komponen afektif yaitu menyangkut masalah emosional subjektif atau perasaan seseorang terhadap partai politik, calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Semarang 2015. Komponen perilaku atau konatif dalam struktur sikap merupakan kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan suatu objek persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai partai politik, calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Semarang 2015.

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa sikap politik menjadi sangat penting dalam menilai sejauh mana kesiapan kaum petani dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Semarang 2015. Penelitian mengenai sikap politik petani memiliki sumbangsih dalam menyumbang kajian kesadaran politik kaum marginal, sehingga perkembangan kaum marginal dapat terangkat dalam sebuah bingkai ilmiah. Sikap politik kaum petani di Kelurahan Pringapus dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Uraian latar belakang permasalahan tersebut akan diteliti lebih lanjut dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap politik petani di Kelurahan Pringapus terhadap Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015?
2. Bagaimana sikap politik petani di Kelurahan Pringapus terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sikap politik petani di Kelurahan Pringapus terhadap Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015.
2. Untuk mengetahui sikap politik petani di Kelurahan Pringapus terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini akan mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta lebih mengerti dan lebih memahami tentang Sikap

Politik Petani dalam Pemilihan Kepala Daerah. Khasanah penelitian dan penulisan karya ilmiah mengenai petani akan menunjukkan adanya eksistensi golongan petani sebagai salah satu golongan yang memiliki jumlah yang maksimal dalam proses politik, khususnya pemilu. Penelitian ini juga akan menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat dan peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian mengenai kelompok petani, serta mendorong rasa ingin tau pembaca mengenai sikap politik petani dalam pemilihan kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Partai Politik, penelitian ini dapat memberikan bahan rujukan mengenai kepedulian Partai Politik kepada petani, sehingga sikap politik petani dalam fenomena demokrasi semakin berkembang dan tidak terabaikan.
- b. Bagi kelompok petani, penelitian ini dapat dijadikan acuan mereka dalam meningkatkan kesadaran politik, sehingga kelompok petani saat ini mampu mengembangkan sikap politiknya terhadap proses pemilu maupun proses perpolitikan di Indonesia.

E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang digunakan diambil dari beberapa pendapat para pakar dalam bidangnya. Namun sebagian ditentukan oleh peneliti dengan maksud untuk kepentingan penelitian ini. Batasan istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap Politik

Sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata atau yang akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap politik adalah relevansi pengertian sikap dan strukturnya terhadap fenomena politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Struktur sikap politik yang perlu dipahami ada tiga yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap politik merupakan perwujudan pengetahuan, emosi, dan konasi dalam menghadapi fenomena politik berupa Pilkada.

2. Petani

Petani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk fokus dalam cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Sehingga petani harus konsisten agar hasil pertaniannya dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Petani di Kelurahan Pringapus ialah salah satu obyek yang

diteliti dalam memahami sikap politik suatu kelompok masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

3. Pilkada

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Semarang 2015 ialah fenomena yang menjadi acuan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sikap Politik

1. Sikap

Mar'at (1992:21) mengemukakan definisi sikap yakni bahwa "Sikap sebagai derajat atau tingkat kesesuaian seseorang terhadap objek tertentu". Mar'at juga mendefinisikan "Sikap merupakan proses sosialisasi dimana seseorang akan bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya". Mar'at juga mengatakan bahwa seseorang akan bereaksi apabila rangsang yang diberikan oleh seorang kumunikator dapat diterima oleh komunikan yang diakibatkan dari adanya hidup bermasyarakat. Mar'at dalam bukunya "Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya", mengutip pendapat Hovland, Janis, & Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada Perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Komunikan akan mengolah dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap.

Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut *attitude* pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer yang menggunakan kata ini untuk menunjuk suatu status mental seseorang. Kemudian oleh para psikolog, sikap dikonsepsikan sebagai alasan perbedaan individual. Sikap akan menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang W. J. Thomas (dalam Ahmadi, 2007:149) mengemukakan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata atau yang akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap merupakan konsep yang membantu memahami tingkah laku. Sejumlah perbedaan tingkah laku dapat merupakan pencerminan atau manifestasi dari sikap yang sama.

Sikap dapat dilihat dari beberapa contoh, misalnya penunjukan sikap positif terhadap musik klasik menghasilkan tingkah laku yaitu menghadiri setiap pementasan musik klasik, membeli kaset-kaset musik klasik, selalu mengikuti acara-acara baik radio maupun TV yang menyiarkan musik klasik, membaca buku-buku yang berhubungan dengan musik klasik. Sikap sosial dinyatakan bukan hanya oleh seseorang saja tetapi diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. Gerungan (2009:201) menegaskan bahwa sikap merupakan sebuah pola yang dapat terbentuk melalui pergaulan, misalnya seseorang yang hidup dalam keluarga disiplin, akan cenderung disiplin juga.

Suatu hal yang penting dalam fenomena pemilu adalah sikap politik masyarakat.

G.W. Alport (dalam Widayatun, 1999:218) menjelaskan sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Selanjutnya pengertian tersebut diperjelas oleh Widayatun bahwa sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya.

Rakhmat (1992:39) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Ketiga, sikap lebih menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.

Cottam (2012:99) mengatakan bahwa salah satu hal terpenting dalam penelitian sikap politik adalah adanya asumsi bahwa sikap seseorang akan menentukan perilaku politik. Pengertian perilaku politik menurut Sastroatmodjo (1995:13) perilaku politik adalah penilaian peranan warga negara dalam sistem politik, baik segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bisa aktor politik, pakar politik, partai politik dan sebagainya sepanjang hal yang dilakukannya itu mengandung

muatan politis. Rakhmat (1992:32) juga mengatakan bahwa pengertian sikap dirinikan menjadi lima yaitu:

pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Kedua, sikap mempunyai daya penolong atau motivasi. Ketiga, sikap lebih menetap. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif. Kelima, sikap timbul dari pengalaman: tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar.

Berkowitz (dalam Azwar, 2013:5) mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Pengertian sikap memang beragam, maka oleh para ahli Psikologi Sosial mutakhir mengklasifikasikan pemikiran tentang sikap terdapat dua pendekatan. Menurut Brecker dan Rejcki (dalam Azwar, 2013:6) pendekatan yang pertama adalah memandang sikap dari ketiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Pendekatan yang kedua timbul karena kognitif, afektif, dan perilaku dalam membentuk sikap.

Simpulan dari pengertian sikap tersebut yakni sikap merupakan kumpulan tiga komponen yang harus dipahami, yakni: afektif yaitu aspek emosional dari faktor sosio psikologis, didahulukan karena erat kaitannya dengan pembicaraan sebelumnya, kognitif yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, dan konatif yaitu aspek volitional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak.

Sikap mengalami pembentukan, perubahan, juga memiliki ciri-ciri dan fungsi sebagai berikut:

a) Pembentukan dan Perubahan Sikap

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu Azwar (2013:30). Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Interaksi sosial tersebut dapat membuat individu dapat bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai obyek psikologis yang dihadapinya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi, atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.

Sikap menimbulkan stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial kebudayaan misalnya keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu, misalnya ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Faktor-faktor yang perubahan sikap intern faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa *selectivity* atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap terbentuk dalam hubungan dengan suatu objek, orang, kelompok, lembaga, nilai, melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok, komunikasi surat kabar, buku, poster, radio, televisi, dan sebagainya. Sementara orang berpendapat bahwa mengajarkan sikap adalah merupakan tanggungjawab orangtua atau lembaga-lembaga keagamaan. Hakikat dari tujuan pendidikan adalah mengubah sikap anak didik ke arah tujuan pendidikan. Hubungan antara sikap dan tingkah laku merupakan adanya hubungan yang erat antara sikap dan tingkah laku didukung oleh pengertian sikap yang mengatakn bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak.

b) Pengukuran Sikap Secara Langsung

Proses untuk melakukan terhadap sikap yaitu *pertama* menghindari pernyataan yang menunjuk kepada masa lampau sebaliknya masa sekarang. *Kedua*, menghindari pernyataan yang dapat diinterpretasikan dengan lebih dari satu macam. *Ketiga*, menghindari pernyataan yang tidak relevan dengan objek psikologi yang akan diungkap. *Keempat*, menghindari pernyataan yang mungkin dibenarkan oleh setiap orang atau sebaliknya tidak seorang pun.

c) Struktur Sikap

Struktur sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Mann (1969) (dalam Azwar, 2013:31) mengemukakan komponen kognitif merupakan persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen kognitif berisi persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Komponen kognitif ini dapat dipahami bahwa komponen kognitif berisi pengetahuan, pendapat seseorang akan suatu objek atau fenomena, dan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum bahwa komponen afektif merupakan perasaan yang timbul dari seseorang terhadap suatu objek. Komponen perilaku atau konatif dalam struktur sikap merupakan kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan suatu objek persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu.

d) Ciri-ciri dan Fungsi Sikap

Ahmadi (2007:164) mengemukakan bahwa sikap akan menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, orang-orang atau kejadian-kejadian. Ciri-ciri sikap yang *pertama* yaitu sikap dapat dipelajari.

Sikap dapat dipelajari secara tidak sengaja dalam memahami suatu hal yang akan membawa seseorang untuk melakukan hal yang lebih baik, membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan. *Kedua*, sikap memiliki kestabilan. Sikap bermula untuk dipelajari kemudian menjadi dorongan yang lebih kuat, stabil, dan melalui pengalaman. Misalnya perasaan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. *Ketiga*, sikap merupakan personal-societal significance. Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau instansi atau situasi. Jika seseorang merasa orang lain menyenangkan, maka itu akan berarti bagi dirinya. *Keempat*, sikap berisi cognisi dan affeksi. Komponen cognisi daripada sikap ialah berisi informasi yang faktual.

Selain ciri-ciri, sikap juga memiliki fungsi sikap dapat dibagi menjadi empat golongan (Ahmadi 2007:165). *Pertama*, sikap berfungsi merupakan alat untuk menyesuaikan diri. Sikap merupakan sesuatu yang bersifat komunikatif sehingga mudah menjadi milik bersama. *Kedua*, Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku yang dapat dimiliki secara spontan. *Ketiga*, sikap berfungsi sebagai alat pengukur pengalaman-pengalaman seseorang dari luar maupun dari dalam diri seseorang. *Keempat*, sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian yang dapat

mencerminkan pribadi seseorang. Sehingga sikap dapat melihat objek-objek tertentu.

e) Tingkatan Sikap

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan (Soekidjo Notoatmojo, 1996) antara lain:

- 1) Menerima (*receiving*). Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).
- 2) Merespon (*responding*). Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut.
- 3) Menghargai (*valuing*). Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah.
- 4) Bertanggung jawab (*responsible*). Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.

2. Politik

Politik ialah bermacam-macam kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*) (Budiardjo, 2008:13).

Menurut Rod Hague (dalam Budiardjo, 2008:16) politik adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya (*politics is the activity by which group reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).

Menurut Andrew Heywood (dalam Budiardjo, 2008:16) politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen, peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) ialah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh

sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Konsep politik yang *pertama* ialah negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. *Kedua*, kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Karl W. Deutsch (dalam Budiardjo, 2008:20) berpendapat bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (*politics is the making of decisions by public means*). *Ketiga*, keputusan (*decision*) ialah hasil dari membuat pilihan diantara beberapa alternatif.

Kebijakan umum (*policy*) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pada prinsipnya sebagai pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Keputusan (*decision*) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang

terjadi sampai keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) ialah pembagian dan penjataan nilai-nilai (*valuers*) dalam masyarakat. Suatu nilai (*value*) ialah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar. Sesuatu yang ingin dimiliki manusia.

Fungsi Partai Politik merupakan ihwal penting dalam politik. Fungsi Partai Politik menurut (Budiardjo 2008:405) ialah pertama sebagai sarana komunikasi politik. Partai Politik bertugas menyerap aspirasi masyarakat yang melalui proses penggabungan kepentingan, perumusan kebijakan, dan menyebarluaskan kebijakan yang telah disepakati. Kedua, Partai Politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses yang melalui penyampaian nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, Partai Politik berfungsi sebagai rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan. Keempat, fungsi Partai Politik ialah sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi pengatur konflik menjadikan Partai Politik menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan pemerintahannya.

3. Sikap Politik

Sastroatmodjo (1995:4) mengemukakan bahwa sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Berdasarkan sikap politik akan dapat diperkirakan perilaku politik apa yang akan muncul. Sikap pada umumnya bersifat relatif menetap atau tidak mudah berubah. Istilah sikap politik erat hubungannya dengan *political efficacy* adalah istilah yang sering digunakan. *Political efficacy* yang secara umum umum yang dikemukakan oleh Schulz (1986:2) tentang *Self efficacy*.

Self efficacy adalah penilaian tentang seberapa baik seseorang dapat menampilkan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi atau tugas tertentu. Penilaian ini berpengaruh kuat terhadap pilihan-pilihan individu, usaha, ketekunan serta emosi yang dikaitkan dengan tugas. Konsep *self efficacy* merupakan elemen penting dari teori sosial kognitif tentang proses belajar, dimana pembelajar mengalami proses belajar secara langsung. Sikap politik dalam bidang politik dapat dilihat dari kepercayaan individu umumnya dikaitkan dengan pengalaman langsung individu terlibat dalam partisipasi politik atau persepsi tentang partisipasi politik berdasarkan pengalaman orang lain.

Political efficacy dalam pandangan tradisional adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang dirinya dan kemampuannya untuk mempengaruhi politik situasi tertentu oleh Sakti (2009:32). *Political*

efficacy merupakan perasaan tentang tindakan individu dalam bidang politik akan membawa, atau akan dapat membawa dampak bagi perubahan proses politik. *Political efficacy* merupakan persepsi individual yang berkaitan dengan seseorang dalam mempengaruhi proses kebijakan. *Political efficacy* adalah perasaan individu mengenai kemampuan yang ia miliki untuk mengerti politik dan keberhasilan yang mereka dapatkan ketika terlibat dalam proses politik. *Political efficacy* sebagai kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan politik.

Political efficacy yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persepsi dan kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang kemampuannya dalam memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan politik. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *political efficacy* kurang lebih ada lima. *Pertama*, Pendidikan merupakan variabel penting yang berhubungan dengan *political efficacy*. Fakta membuktikan secara konsisten bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah Almond dan Verba (1963:13). *Kedua*, informasi politik yaitu individu yang memiliki informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung lebih mau terlibat dalam politik. *Ketiga*, *gender* yaitu banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa laki-

laki lebih berpartisipasi dalam politik dibandingkan perempuan (Almond dan Verba, 1963:13).

Sastroatmodjo (1995:5) mengemukakan bahwa konsep sikap dapat dihubungkan dengan politik, sehingga sikap dapat dilakukan oleh individu atau berbagai kelompok. Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi seseorang atau kelompok untuk mengahadai, merespon masalah-masalah politik yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk.

Bentuk sikap dapat dicontohkan misalnya saat ada ada kebijakan yang dikeluarkan pihak yang berwenang akan menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa dan ada pula yang lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa. Sudijono mengatakan bahwa diam juga dapat dikatakan sebagai sikap politik, sebab dengan diam tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap objek atau persoalan tertentu yang ada disekitarnya. Diam dapat berarti setuju, dapat berarti netral, dapat berarti menolak, akan tetapi merasa tidak berdaya untuk membuat pilihan.

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga akan bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukkan bersifat negatif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga

bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari aktor sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di lingkungan aktor sikap politik tersebut.

Sastroatmodjo (1995:7) mengatakan bahwa sikap merupakan “pre-disposisi” atau kecenderungan bertindak. Sehingga sikap masih termasuk internal. Sikap politik adalah relevansi pengertian sikap dan strukturnya terhadap fenomena politik pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015. Merujuk pada pengertian sikap, struktur sikap politik yang perlu dipahami ada tiga seperti *pertama*, komponen kognitif yang berupa persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai partai politik dan tokoh politik yang akan maju menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang 2015 mendatang. *Kedua*, komponen afektif yaitu menyangkut masalah emosional subjektif atau perasaan seseorang terhadap partai politik, dan calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. *Ketiga*, komponen perilaku atau konatif dalam struktur sikap merupakan kecenderungan berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan suatu objek persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai partai politik dan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Semarang 2015.

B. Petani

1. Definisi Petani

Adiwilaga (1992:34) mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Petani pada umumnya akan konsisten dengan pekerjaannya agar hasil pertaniannya dapat menopang kehidupannya sehari-hari. Salim dan Sahono (2013:54) mengemukakan petani adalah seorang yang mempunyai profesi bercocok tanam (menanam tumbuh-tumbuhan) dengan maksud tumbuh-tumbuhan dapat berkembang biak menjadi lebih banyak serta untuk dipungut hasilnya, tujuan menanam tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dapat dimakan manusia dan hewan peliharaanya

Mosher (1966:82) mengatakan bahwa pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

Slamet (2000:18) mengatkan bahwa bertolak dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara petani dan pertanian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena itu perbedaannya hanya terletak pada obyek saja. Petani asli ialah petani yang memiliki

tanah sendiri, bukan sekedar penggarap maupun penyewa. Konsep tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang petani. Poin penting dari konsep tersebut di atas bukan hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat utama petani, melainkan bahwa alat produksi tersebut mutlak dimiliki oleh seorang petani.

Pertanian adalah suatu hal yang tidak asing di desa. Organisasi sosial petani tercipta dimulai dari aspek keluarga, kemudian berubah unit-unit yang lebih besar. Semuanya itu berpengaruh pada eksistensi petani, sehingga terbentuk tatanan sosial bagi petani. Kaum tani juga memiliki kelompok domestik. Kelompok petani terbentuk karena adanya koalisi berkepentingan sama, dimana petani terbangun oleh senasib yang sama, kedua ikatan yang mencakup satu dengan yang lainnya. Hubungan petani ialah hubungan kekerabatan, tetangga, persahabatan, dan aturan atau sanksi yang tidak boleh dilanggar. Koalisi yang terbentuk akibat keterlibatan petani dalam kelompok dengan satu kepentingan yang relevan.

Petani merupakan bagian dari tatanan sosial yang luas karena di dalamnya ada ikatan yang terbentuk dengan ikatan simbolik. Ada suatu kemiripan unik dari kehidupan petani dengan kehidupan manusia primitif karena mereka sama-sama mengedepankan produktivitas. Petani dalam pandangan Wolf (dalam Syahyuti, 2006) bahwa kaum petani pedesaan sudah perubahan dari tradisional merupakan persamaan manusia primitif beralih ke pedesaan.

Simpulan dari pengertian tersebut ialah petani merupakan petani merupakan seseorang yang berprofesi dengan bercocok tanam dan mengandalkan tanah sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya.

2. Jenis-jenis petani

Menurut James C. Scoot (dalam Ali, 2014:22) jenis petani terbagi secara hirarkhis status yang begitu konvensional di kalangan petani seperti, petani lahan kecil, petani penyewa dan buruh tani. Menurut beliau bahwa kategori-kategori itu tidak bersifat eksklusif, oleh tambahan yang disewa. Petani "*peasant*" adalah gambaran dari petani yang subsisten, sedangkan "*farmer*" adalah petani modern yang berusahatani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis.

Menurut Rahardjo (1986:23), kelas-kelas petani yang ada dalam masyarakat pedesaan ada beberapa tingkat, yaitu:

- a. Tuan tanah, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian lebih dari 5,0 ha. Sebagian dari mereka mampu menggarap lahan dengan tenaga kerja keluarga atau dengan mempekerjakan beberapa buruh tani. Sebagian pula menyewakan (menyewakan dengan system bagi hasil) seluruh atau sebagian lahan itu kepada petani penggarap.
- b. Petani kaya, yaitu petani yang memiliki lahan antar 2,0 sampai 5 ha. Petani semacam ini ada kalanya juga menyewakan kepada orang

lain karena tidak mampu menggarap semua lahan yang dimilikinya.

- c. Petani sedang, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian antara 0,5 ha sampai 2,0 ha.
- d. Petani kecil, yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian antara 0,25 ha sampai 0,5 ha.
- e. Petani gurem, yaitu petani yang hanya memiliki lahan pertanian antara 0,10 sampai 0,25 ha.
- f. Buruh tani, yaitu petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,10 ha. Bahkan petani ini juga dapat digolongkan pada mereka yang tidak mempunyai lahan sama sekali.

C. Kampanye Politik

Firmansyah (2007:268) mengatakan bahwa kampanye lebih merupakan suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan. Segala cara mungkin dipakai dalam pemilu, diantaranya janji-janji yang muluk dan acapkali tidak masuk akal. Kampanye kerap kali sekadar basa-basi politik. Rakyat secara umum bersifat apatis atau *sumonggo kerso* yang penting aman. Kampanye yang merupakan bagian dari marketing politik pun dirasa perlu oleh partai-partai politik menjelang pemilu. Sebaliknya jika pemilu telah selesai, maka mereka melupakan segala janji.

Firmansyah (2007:270) mengemukakan bahwa kampanye politik merupakan kegiatan yang terbatas pada periode tertentu menjelang pemilihan umum. *Pertama*, interaksi politik antara partai politik dan publik seolah-olah hanya terjadi selama periode tersebut. *Kedua*, kampanye politik adalah proses komunikasi politik dialogis antara partai politik dengan masyarakat. Tujuan komunikasi politik adalah untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan persepsi antara partai dengan masyarakat. *Ketiga*, fokus pada periode tertentu menjelang pemilu membuat arti penting publik di mata partai politik menjadi sekedar memberikan suara saat pemilu.

Lock dan Harris (1996) (dalam Alwie, 2012:3) mengatakan bahwa kampanye politik merupakan pembentukan image politik. Kampanye politik di dalamnya memiliki hubungan yang akan dibangun. Ketidakpercayaan terhadap partai politik semakin kental. Sikap apatis tadi semakin pekat. Rakyat semakin tidak percaya pada politik, sehingga banyak kalangan skeptik yang cukup kritis akhirnya mengambil sikap golput. Masyarakat kelas bawah politik tidak ubahnya pertempuran elite masyarakat dan tidak merubah apapun kondisi yang ada. Pemilu disosialisasikan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan daripada proses dialogis antara kandidat dan pemilih. Kampanye sebagai suatu proses 'jangka pendek', dimana semakin kuat anggapan tentang tidak relevannya intensitas para kandidat dalam memperkenalkan ide dan gagasan politik yang dimaksudkan untuk sekedar menarik perhatian serta

dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai kandidat dari janji dan harapan yang diberikan selama periode kampanye pendek saja.

Firmansyah (2007:274) mengemukakan bahwa kampanye politik dibutuhkan untuk meningkatkan reputasi partai politik. Kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk) dan pengiklanan partai. Periode waktu sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketidaksepakatan tentang pengaruh kampanye pemilu terhadap perilaku pencoblosan (*voting behaviour*). Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kampanye pemilu melalui aktivitas pengiklanan dan debat publik di televisi meningkatkan partisipasi pemilih.

D. Kerangka Berfikir

Sikap politik petani merupakan salah satu penyusun elemen suara rakyat dalam ajang demokrasi dari kaum marjinal. Kelompok petani merupakan bagian dari bangsa ini yang keberadaannya terpinggirkan, sebab adanya stratifikasi sosial membuat mereka tersisihkan padahal mereka merupakan bagian dari perjuangan bangsa ini dalam menginterpretasikan gerakan sosial, adanya stratifikasi sosial yang tidak dapat dipungkiri ada terjadi dalam kehidupan berbangsa sehari-hari membuat bangsa ini harus menelan pil pahit yakni kurang adanya kepedulian kita kepada kaum marjinal. Sebagai kaum yang dianggap miskin dan bodoh membuat mereka seakan menarik diri dari kehidupan

politik. Kehidupan politik banyak diisi oleh masyarakat menengah-ke atas yang memiliki akses dengan para aktor politik. Seharusnya partai politik lebih mengakomodir kepentingan seluruh rakyat dan tidak terkecuali kelompok petani.

Jika diperhatikan mungkin kelompok petani seakan-akan tidak peduli dalam hal politis bangsa ini, namun mereka seperti itu karena bangsa ini yang telah membuat mereka enggan dalam kehidupan sistem politik padahal sejarah mengatakan bahwa mereka memiliki peranan yang cukup besar dalam gerakan sosial Indonesia. Sikap politik petani ini pasti beragam sebab mereka telah beberapa kali terlatih dengan adanya ajang demokrasi berupa Pemilihan Umum (Pemilu). Sikap politik petani tidak menjadi perbincangan hangat dalam kalangan ilmuwan politik karena dianggap bahwa suara petani tidak akan memiliki dampak dalam sebuah ajang demokrasi. Sikap politik dari waktu ke waktu, dari periodisasi kepemimpinan satu hingga sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan sikap politik petani setelah era reformasi ini mengalami sebuah perubahan, perubahan tersebut dapat berupa perkembangan maupun penurunan, inilah yang mendasari pemikiran peneliti untuk menelisik bagaimana Sikap Politik Petani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus. Kerangka berpikir dalam penelitian dapat disajikan melalui Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Berfikir terbentuknya Judul Penelitian

Benang merah yang menjadi latar belakang terjadinya penyingkiran petani di Indonesia sendiri adalah kepentingan politik ekonomi pemerintah dan partai politik di masing-masing masa. Pada masa Orde Lama gerakan sosial PKI yang mengusung tema kelompok petani dan buruh menjadi promotor bergeraknya sistem politik. Pada masa Orde Baru ini kata gerakan sosial nyaris tidak terdengar, dan kurang menjadi fokus partai politik, bahkan dilarang untuk diperbincangkan. Implikasinya adalah segala hal yang berbau marjinalisme dianggap tidak memiliki kekuatan politik baik itu suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Petani di Kelurahan Pringapus yang aktif dalam Kelompok Tani memiliki sikap politik terhadap Partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 yang lebih baik, yaitu pengetahuannya sudah memahami Partai Politik sebagai penampung aspirasi rakyat karena memiliki kedekatan khusus dengan Partai Politik, emosinya muncul perasaan suka karena ingin balas budi terhadap Partai Politik yang memberi bantuan, dan konatifnya cenderung memilih Partai Politik yang mempedulikan nasib petani, sebaliknya petani yang tidak aktif dalam Kelompok Tani memiliki sikap politik yang lebih buruk, yaitu pengetahuannya belum memahami Partai Politik, emosinya muncul perasaan tidak suka karena kecewa terhadap kinerja Partai Politik, dan konatifnya mengalami kebingungan dalam memilih karena Partai Politik dianggap tidak memiliki dampak dalam kehidupan petani.
2. Petani di Kelurahan Pringapus yang aktif dalam Kelompok Tani memiliki sikap politik terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 yang lebih baik,

yaitu pengetahuannya sudah memahami latar belakang pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, emosinya muncul perasaan suka karena mengapresiasi kampanye pasangan calon ke daerah, dan konatifnya cenderung memilih pasangan calon yang memberikan pendekatan khusus kepada petani, sebaliknya petani yang tidak aktif dalam Kelompok Tani memiliki sikap politik yang lebih buruk, yaitu pengetahuannya belum memahami pasangan calon, emosinya tidak suka terhadap pasangan calon yang kampanye hanya untuk meminta suara rakyat, dan konatifnya mengalami kebingungan dalam memilih karena pasangan calon dianggap tidak dapat melaksanakan visi-misi yang sudah dikampanyekan.

B. Saran

Dari simpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendekatan yang lebih intens dari Partai Politik terhadap kaum petani yang tidak aktif dalam Kelompok Tani seperti komunikasi politik yang lebih mendalam kepada para petani, sehingga kepuasan petani terhadap kinerja Partai Politik dan partisipasi petani dalam Pilkada dapat meningkat.
2. Perlu adanya pendekatan yang lebih merata ke daerah dari pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati yang tidak aktif dalam Kelompok

Tani seperti penyampaian visi-misi kepada para petani, sehingga petani dapat mengenal lebih detail pasangan calon.



DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku

- Adiwilaga, Anwas. 1992. *Ilmu Usaha Tani*. Bandung: Alumni.
- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik : Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Asmali, Anwas. 1992. *Perjuangan Petani Tebu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifudin. 2013. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka.
- Cottam, Martha L dkk. 2012. *Pengantar Psikologi Politik*. terjemahan Hamdi Muluk. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewanto. 2005. *Metodologi Penelitian, tinjauan Filosofis dan Praksis*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Firmansyah. 2007. *Marketing Politik: antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gerungan, W. A. 2009. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harrop, dkk. 1987. *Mailers, Election, and Voter: A Compatitiv Into Introduction*. Mac Milan: Hampshire.
- Haywood, Andrew. 2002. *Politics*. Newyork: Rod Hague.
- Mar'at. 1992. *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Gramedia Widiya Pustaka Utama.
- Mann, L. 1969. *Social Psychology and Modern Life*. New York: Alfred A Knopt, INC.
- Miles, Mattew B. dan A.M Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitaif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mosher, 1995. *Pertanian (Agrikultur)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution. 2004. *Penelitian Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: BumiAksara.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoned Poesponegoro. 2010. *Sejarah Nasional IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: LAB Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Rahardjo, Dawan. 1984. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: UI Press.
- Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Schmandt, Henry. 1960. *Filsafat Politik*. terjemahan Ahmad Baidlowi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schultz, D. P. 1998. *Psychological and Work Today: An introduction to Industrial and Organizational Psychology*. New Jersey: Prentice Hall.
- Slamet. 2000. *Agrikultur*. Bogor: LPN IPB.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syahyuti. 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Widayatun, Tri Rusmi. 1999. *Ilmu Perilaku*. Jakarta: CV. Sagung Seto.

Widjardjo, Boedhi dan Herlambang Perdana. 2001. *Reclaiming dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: YLBHI dan RACA Institute.

Jurnal

Ali, M. Perjuangan Masyarakat Petani Tambak Untuk Tetap Survive. Surabaya: *Jurnal Petani UIN Surabaya*, Vol 1. No. 1

Alwie, Alvi Furwanti. Pemasaran Politik dan Keputusan Memilih Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah pada Kelompok Perkotaan dan Kelompok Pinggiran Kota. Pekanbaru: *Jurnal Sosial Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 2. No. 6.

Eriyanto. 2008. Konsentrasi Kepemilikan Media, dan Ancaman Ruang Publik. Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 12.No. 2.

Salim dan Kahono. 2013. Fenomena Kemiskinan pada Masyarakat Petani Sawah (Studi Kasus pada Petani Sawah di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Lampung: *Jurnal Sociologie*, Vol 1. No. 1.

Schulz, Wolfram. 2005. Political Efficacy and Expected Political Participation among Lower and Upper Secondary Student. Melbourne: *Australian Council for Educational Research*, Edisi September.

Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 BAB X Warga Negara Pasal 28 tentang HAM.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemilihan Kepala Daerah 2015 menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Skripsi

Sakti, Yenny Merdeka. Perbedaan Political Efficacy pada Peran Gender Makulin, Feminin, Androgini, dan Undifferentiated. *Skripsi*. Medan: Fakultas Psikologi USU.

Artikel

Purwanto, Heri. 2012. *Menelusuri Perkembangan Studi Gerakan Petani*. Artikel Serikat Petani Indonesia.

Ali, M. *Perjuangan Masyarakat Petani Tambak untuk Tetap Survive*. Surabaya: Artikel E-Library UIN Sunan Ampel.

Internet

BPS. *Sensus Pertanian 2013*. <http://bps.go.id/>. (28 Desember 201).

IMF. 1997. *Word Economic Outlook*. <http://www.imf.org/>. (28 Desember 2014).

KPU. 2009. *Pemilu di Indonesia*. <http://www.kpu.go.id/>. (28 Desember 2014).

Stratifikasi di Indonesia. <http://www.sselajar.com/>. (28 Desember 2014).